

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Kasus *fraud* bisa terjadi di kalangan instansi pemerintahan baik pusat maupun daerah. Berdasarkan data yang dikeluarkan *Transparency* pada tahun 2020, skor indeks persepsi korupsi Indonesia terus membaik dari tahun ke tahun. Tahun ini skor CPI Indonesia naik dua poin dari tahun sebelumnya menjadi 40 dan berada pada posisi 85 dari 180 negara.

Dalam akuntansi, *fraud* merupakan penyimpangan dari prosedur akuntansi yang seharusnya diterapkan dalam suatu objek. *Fraud* adalah sebuah tindakan yang menyebabkan kesalahan pelaporan dalam laporan keuangan, atau suatu tindak kesengajaan untuk menggunakan sumber daya perusahaan secara tidak wajar dan salah menyajikan fakta untuk memperoleh keuntungan pribadi (Pramudita, 2013).

*Fraud* yang sering terjadi dalam sektor pemerintahan yaitu kasus korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* dari kata kerja *corrumpere* yang memiliki arti busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalikkan. Menurut UU No. 20 Tahun 2001 korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri maupun pihak lain, dimana hal tersebut dapat merugikan instansi.

Di instansi pemerintah, korupsi tidak hanya melibatkan orang yang mempunyai jabatan tinggi, tetapi juga bawahannya. Korupsi tidak hanya terjadi di pemerintah pusat, tapi bisa juga pada pemerintah daerah. Meninggikan dana Surat Perintah Perjalanan (SPJ), penggelembungan nilai anggaran, dan menambahi tunjangan selain gaji pokok merupakan tindak korupsi yang sering terjadi dan merugikan keuangan atau perekonomian negara. Adanya perasaan tidak puas atau ketidakadilan yang diterima dalam suatu organisasi menyebabkan terjadinya kecurangan. Selain itu, adanya peluang untuk melakukan penyelewengan juga dapat mengakibatkan terjadinya kecurangan. Dalam instansi pemerintah sering terjadi kasus penyelewengan aset oleh pihak-pihak tertentu.

Salah satu kejadian kecurangan di pemerintahan kabupaten Ngawi adalah kasus tindak pidana korupsi pada pengadaan tanah SMPN 1 Mantingan. Polres Ngawi mendatangkan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jatim untuk mengaudit besaran keuangan negara yang menguap akibat pengadaan tanah tersebut. Indikasi kerugian negara atas pengadaan tanah SMPN 1 Mantingan tersebut ditaksir bernilai lebih dari Rp 1 Milyar. Kasus ini sendiri berawal dari lahan SMPN 1 Mantingan yang sejak awal milik Ponpes Gontor dan akan diminta kembali. Akibat kasus ini, nama Dinas Pendidikan Ngawi ikut tercoreng dan SMPN 1 Mantingan juga tak kunjung mendapat lokasi sekolah yang baru.

Banyak hal yang menjadi alasan seseorang untuk melakukan tindak korupsi. Perasaan tidak puas atau ketidakadilan yang diterima seseorang dalam suatu organisasi dapat menjadi salah satu faktor terjadinya korupsi. Kasus yang disajikan diatas menimbulkan berbagai persepsi pegawai instansi pemerintahan untuk menjelaskan berbagai faktor yang mempengaruhi terjadinya *fraud* di sektor pemerintahan. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *fraud* tersebut berupa keefektifan pengendalian internal, penegakan peraturan, asimetri informasi, kesesuaian kompensasi, keadilan prosedural, budaya etis organisasi, komitmen organisasi, dan gaya kepemimpinan.

Obyek penelitian ini yaitu Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) Kabupaten Ngawi. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Ngawi karena banyaknya isu mengenai dugaan korupsi yang sampai saat ini masih sering terjadi, khususnya di Kabupaten Ngawi. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Mustikasari (2013) tentang keefektifan pengendalian internal, penegakan peraturan, asimetri informasi, kesesuaian kompensasi, keadilan prosedural, budaya etis organisasi, dan komitmen organisasi terhadap *fraud* di sektor pemerintahan. Serta menambah satu variabel lain yaitu gaya kepemimpinan dari penelitian Zulkarnain (2013). Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan Mustikasari (2013) dan Zulkarnain (2013). Perbedaan tersebut terletak pada objek penelitian yang dilakukan di Sektor Pemerintahan Kabupaten Batang, sedangkan pada penelitian ini meneliti Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Ngawi, sehingga peneliti mengambil judul “**Faktor-Faktor**

yang Mempengaruhi *Fraud* pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi”.

### 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka selanjutnya diajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah keefektifan pengendalian internal berpengaruh terhadap *fraud* pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Ngawi ?
2. Apakah penegakan peraturan berpengaruh terhadap *fraud* pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Ngawi?
3. Apakah asimetri informasi berpengaruh terhadap *fraud* pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Ngawi?
4. Apakah kesesuaian kompensasi berpengaruh terhadap *fraud* pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Ngawi?
5. Apakah keadilan prosedural berpengaruh terhadap *fraud* pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Ngawi?
6. Apakah budaya etis manajemen berpengaruh terhadap *fraud* pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Ngawi?
7. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap *fraud* pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Ngawi?
8. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap *fraud* pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Ngawi?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh keefektifan pengendalian internal terhadap *fraud* pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Ngawi
2. Untuk menganalisis pengaruh penegakan peraturan terhadap *fraud* pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Ngawi.
3. Untuk menganalisis pengaruh asimetri informasi terhadap *fraud* pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Ngawi.

4. Untuk menganalisis pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap *fraud* pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Ngawi.
5. Untuk menganalisis pengaruh keadilan prosedural terhadap *fraud* pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Ngawi.
6. Untuk menganalisis pengaruh budaya etis organisasi terhadap *fraud* pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Ngawi.
7. Untuk menganalisis pengaruh komitmen organisasi terhadap *fraud* pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Ngawi.
8. Untuk menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan terhadap *fraud* pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Ngawi.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian di atas maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti  
Diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan pengembangan ilmu peneliti khususnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.
2. Bagi Organisasi Pemerintah Daerah  
Diharapkan dapat menjadi masukan tentang pentingnya pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *fraud* serta usaha mencegah terjadinya *fraud* di instansi pemerintahan.

#### **1.5. Sistematika Penulisan Laporan Skripsi**

Sistematika penulisan laporan skripsi terbagi menjadi lima bab sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

Bab 2 Tinjauan Pustaka. Bab ini berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis, dan model penelitian/rerangka konseptual.

Bab 3 Metode Penelitian. Bab ini berisi tentang desain penelitian; identifikasi, definisi operasional, dan pengukuran variabel; jenis dan sumber data; metode pengumpulan data; populasi, sampel, dan teknik penyampelan; analisis data.

Bab 4 Analisis Dan Pembahasan. Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, deskripsi data, hasil analisis data, dan pembahasan.

Bab 5 Kesimpulan, Keterbatasan, dan Saran. Bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.